

RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,27				70,27	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9,59%				9,59%
									Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,30%				8,30%
									Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	67,00%				67,00%
								Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54,84%	40%		14,84%	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen			
								Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org				5250 org
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi			30 Organisasi	
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39,33%				39,33%
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga	35 lembaga			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 org		35 org		
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokume n		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,13				9,13	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,091%				0,091%
									Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	100%				100%
								Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	50 kasus	15 kss	15 kss	10 kss	10 kss
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen		2 dokume n		
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	30 Perangka t daerah			
								Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%				100%
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	15 org	15 org	10 org	10 org

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	10 Layanan	10 Layanan
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%				100%
								Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data				3 jenis data
								Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen				4 Dokume
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen				4 dokume n
	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd ≤ 18 thn)	10,71				10,71	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,107%				0,107%
									Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%				100%
								Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	55 kasus	10 org	15 org	14 org	16 org
								Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Org				
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%				100%
								Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Orang	10 org	15 org	14 org	16 org
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	10 org	15 org	14 org	16 org

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga		41 Lembaga		
								Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg		1 Dokumen	1 Dokumen	
								Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org		30 org		
		Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	73,0%				73,00%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76%				54,76%
								Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga				46 lembaga
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	35 Organisasi			
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen		
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga				38 lembaga
								Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		80 Orang		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen				24 Dokumen

Kota Bima, Januari 2025

Kepala DP & PA Kota Bima



Syahrudin, SH, M.M

NIP. 19690707 198903 1 004